

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp402.487.512.960,60
2. Pendapatan Transfer	Rp2.234.991.490.708,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp49.847.927.014,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp2.687.326.930.682,60
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp989.298.004.815,40
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp741.774.843.163,69
c) Belanja Bunga	Rp0,00
d) Belanja Subsidi	Rp0,00
e) Belanja Hibah	Rp111.159.638.769,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp12.301.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp1.854.533.486.748,09
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp1.081.007.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp63.599.826.229,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp131.000.970.097,54
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp174.733.447.960,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp6.946.458.297,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp371.600.250,00
Jumlah Belanja Modal	Rp377.733.309.833,54
3. Belanja Tidak Terduga	Rp5.055.487.150,00
4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil ke Desa	Rp17.822.911.360,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp448.281.970.100,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp466.104.881.460,00
Jumlah Belanja (1+2+3+4)	Rp 2.703.427.165.191,63
Defisit (a-b)	(Rp16.100.234.509,03)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp372.130.280.413,04
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp3.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp368.630.280.413,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp352.530.045.904,01

V

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 26 Juli 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	(%)
4	**PENDAPATAN**	**2.616.757.661.539,00**	**2.687.326.930.682,60**	**70.569.269.143,60**	**102,70**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**372.424.742.693,00**	**402.487.512.960,60**	**30.062.770.267,60**	**108,07**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	136.875.250.000,00	149.424.800.824,00	12.549.550.824,00	109,17
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	29.260.340.224,00	29.386.629.455,58	126.289.231,58	100,43
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.425.444.869,00	4.425.444.868,86	(0,14)	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.863.707.600,00	219.250.637.812,16	17.386.930.212,16	108,61
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.190.454.229.144,00**	**2.234.991.490.708,00**	**44.537.261.564,00**	**102,03**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.982.259.282.144,00	2.002.309.215.415,00	20.049.933.271,00	101,01
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	208.194.947.000,00	232.682.275.293,00	24.487.328.293,00	111,76
4.3	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	***53.878.689.702,00***	***49.847.927.014,00***	***(4.030.762.688,00)***	**92,52**
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	50,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.878.689.702,00	46.847.927.014,00	(1.030.762.688,00)	97,85
5	**BELANJA**	**2.982.337.331.152,00**	**2.703.427.165.191,63**	**(278.910.165.960,37)**	**90,65**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.099.432.880.481,00**	**1.854.533.486.748,09**	**(244.899.393.732,91)**	**88,33**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.149.019.123.604,00	989.298.004.815,40	(159.721.118.788,60)	86,10
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	825.561.365.733,00	741.774.843.163,69	(83.786.522.569,31)	89,85
5.1.4	Belanja Hibah	112.427.191.144,00	111.159.638.769,00	(1.267.552.375,00)	98,87
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.425.200.000,00	12.301.000.000,00	(124.200.000,00)	99,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**393.697.523.943,00**	**377.733.309.833,54**	**(15.964.214.109,46)**	**95,95**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.700.000.000,00	1.081.007.000,00	(618.993.000,00)	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.749.038.601,00	63.599.826.229,00	(8.149.212.372,00)	88,64
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.409.092.368,00	131.000.970.097,54	(2.408.122.270,46)	98,19
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	179.461.328.939,00	174.733.447.960,00	(4.727.880.979,00)	97,37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.988.064.035,00	6.946.458.297,00	(41.605.738,00)	99,40
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	390.000.000,00	371.600.250,00	(18.399.750,00)	95,28

	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	(%)
5 . 3	**BELANJA Tidak Terduga**	**16.870.930.068,00**	**5.055.487.150,00**	**(11.815.442.918,00)**	**29,97**
5 . 3 . 01	Belanja Tidak Terduga	16.870.930.068,00	5.055.487.150,00	(11.815.442.918,00)	29,97
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**472.335.996.660,00**	**466.104.881.460,00**	**(6.231.115.200,00)**	**98,68**
5 . 4 .01	Belanja Bagi Hasil	17.824.779.760,00	17.822.911.360,00	(1.868.400,00)	99,99
5 . 4 .02	Belanja Bantuan Keuangan	454.511.216.900,00	448.281.970.100,00	(6.229.246.800,00)	98,63
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(365.579.669.613,00)**	**(16.100.234.509,03)**	**349.479.435.103,97**	**4,40**
6	**PEMBIAYAAN**				
6 . 1	**PENERIMAAN DAERAH**	**372.079.669.613,00**	**372.130.280.413,04**	**50.610.800,04**	**100,01**
6 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	372.079.669.613,00	372.079.669.613,04	0,04	100,00
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	50.610.800,00	50.610.800,00	0,00
6 . 2	**PENGELUARAN DAERAH**	**6.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**53,85**
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	3.500.000.000,00	(3.000.000.000,00)	53,85
	PEMBIAYAAN NETTO	**365.579.669.613,00**	**368.630.280.413,04**	**3.050.610.800,04**	**100,83**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**352.530.045.904,01**	**352.530.045.904,01**	**0,00**

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001